

Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua

Cahyo Pamungkas¹, Irin Oktafiani², Leonardus Imbhiri³

¹Jaringan Damai Papua (JDP), Indonesia

cahyopamungkas@gmail.com

²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia

irin.oktafiani@gmail.com

³Dewan Adat Papua (DAP), Indonesia

imbirijerry@gmail.com

ABSTRACT

Development in Papua is the keyword of all the policies of the Government of Indonesia in this land as a strategy to coping with the conflict of separatism. However, although a number of policies have been implemented, such as Special Autonomy and various Presidential Instructions or Presidential Decrees on the Acceleration of Development in the Provinces of Papua and West Papua, the human development index in these two provinces is the lowest in Indonesia. Many studies have been conducted on the socio-cultural impact of development on indigenous Papuans. For example, Tania Li (1999), who focuses on the impact of development on the marginalization and loss of OAP identity. In addition, Elmslie and Web-Ganon (2010) also narrated the slow-motion genocide as a result of the depopulation of indigenous Papuans. The latest study conducted by LIPI (2019) shows that development does not reach the target for the indigenous Papuan and has not accommodated the cultural traditions of the Papuan people. Therefore, this article aims to explore the meaning of development for indigenous Papuans, especially how marginalization is conceptualized by Papuans and how marginalization plays a role in the depopulation of Papuans.

Keywords: *Development, Indigenous Papuans, Marginalization, Depopulation*

ABSTRAK

Pembangunan di Tanah Papua merupakan kata kunci dari segala kebijakan Pemerintah Indonesia di daerah ini sebagai strategi untuk mengatasi konflik separatisme. Namun, meskipun sejumlah kebijakan telah dilaksanakan seperti Otonomi Khusus dan berbagai Inpres atau Kepres tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, namun indeks pembangunan manusia di kedua provinsi ini menempati angka yang paling rendah di Indonesia. Penelitian mengenai dampak sosial budaya pembangunan terhadap orang asli Papua telah banyak dilakukan. Misalnya, Tania Li (1999), yang memfokuskan pada dampak pembangunan terhadap peminggiran dan hilangnya identitas OAP. Selain itu, juga Elmslie dan Web-Ganon (2010) yang menarasikan mengenai slow motion genocide sebagai akibat dari depopulasi orang asli Papua. Studi terbaru dilakukan oleh LIPI (2019) menunjukkan bahwa pembangunan tidak mencapai sasaran pada orang asli Papua dan belum mengakomodasi tradisi kebudayaan orang Papua. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali makna pembangunan bagi orang asli Papua, terutama Bagaimanakah marginalisasi dikonseptualisasikan oleh orang Papua dan Bagaimanakah marginalisasi berperan terhadap depopulasi orang Papua.

Kata Kunci: *Pembangunan, Orang Asli Papua, Marginalisasi, Depopulasi*

Pendahuluan

Makna pembangunan seringkali erat dengan keadaan ekonomi dan dianggap sebagai cara untuk memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik, misalnya perbaikan kualitas hidup, perubahan ekonomi status, dan lain-lain.¹ Akan tetapi pembangunan seharusnya dilihat lebih dari sekadar keadaan ekonomi dalam suatu negara. Meminjam pemikiran Amartya Sen (Sen, 2000, p. 3) dalam melihat pembangunan, Ia melihat bahwa pembangunan sejatinya adalah sebuah proses mengusahakan kebebasan secara terus-menerus untuk membuat masyarakat berada dalam keadaan nyaman, yang intinya memanusiakan masyarakat secara menyeluruh.² Sayangnya, dalam upaya mengusahakan kebebasan dan memanusiakan masyarakat secara menyeluruh seringkali ada pihak-pihak yang termarginalisasi.

Marginalisasi seringkali muncul dalam studi terkait globalisasi dan *urban development* untuk menggambarkan ketidakberuntungan dan keberadaan kelompok-kelompok atau komunitas yang tidak mampu menjangkau atau malah terpinggirkan dari proses tersebut. Ditambah lagi, marginalisasi seringkali terjadi karena sulitnya menghadapi eksistensi kekuasaan yang lebih tinggi diantaranya, negara dan korporasi. Sebagai contoh, Tanasaldy mencoba melihat adanya marginalisasi terhadap orang Dayak terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.³ Posisi orang Dayak malah menjadi terpinggirkan mengatasnamakan pembangunan.

Tulisan ini bermula dari ketertarikan penulis pada saat mempelajari indeks pembangunan manusia (IPM) pada dua provinsi Papua dan Papua Barat dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. IPM merupakan salah satu indikator umum yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Indikator ini berisikan tiga faktor yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Apabila dilihat dari 2010 sampai 2018, IPM Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami kenaikan tetapi masih jauh di bawah rata-rata IPM nasional. Sebagai catatan, di kabupaten-kabupaten yang masih didominasi penduduknya oleh orang asli papua (OAP), nilai rata-rata IPM-nya cukup rendah, misalnya Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, dan Pegunungan Arfak memiliki angka IPM 56 pada 2018. Sebaliknya, di kota atau kabupaten yang penduduknya terdapat pendatang dalam jumlah yang dominan atau signifikan, angka IPM-nya rata-rata tinggi seperti Kota Sorong dan Kota Jayapura. Berikut data lengkap IPM Papua dan Papua Barat. Perlu dicatat bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki IPM rendah dan tingkat kemiskinan tinggi biasanya terjadi pada kabupaten pemekaran. Daerah-daerah tersebut masih mencari model pembangunan yang tepat dan memiliki kapasitas yang terbatas dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, IPM di kabupaten induk yang pada umumnya memiliki jumlah pendatang secara signifikan memiliki IPM lebih tinggi.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat

IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Papua	59,6	59,9	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74
Papua Barat	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06
Indonesia	66,53	67,70	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,30

Sumber: BPS Papua Dalam Angka (2010-2018), Papua Barat dalam Angka (2010-2018)

¹ Deb, D. (2009). *Beyond developmentality: Constructing inclusive freedom and sustainability*. London & Sterling VA: Earthscan. Lihat juga: Oktafiani, I., Suyadnya, I. W., & Triyono. (2019). Pembangunan dan strategi bertahan hidup masyarakat Kepulauan Kecil Terluar di Papua, Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 45(2), 139–157.

² Sen, A. (2000). *Development as freedom*. Oxford: Alfred A. Knopf, Inc.

³ Ibid.

Melalui angka-angka IPM ini, penulis melihat bahwa orang asli Papua (OAP) berada dalam kondisi marginal. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mencoba menangkap makna pembangunan dari perspektif orang asli Papua (OAP) melalui proses kebebasan dan memanusiakan masyarakat Papua yang sampai saat ini malah berada dalam kondisi marginal. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: (i) bagaimanakah kajian-kajian sebelumnya terhadap marginalisasi orang Papua; (ii) Bagaimanakah marginalisasi dikonseptualisasikan oleh orang Papua dan (iii) Bagaimanakah marginalisasi berperan terhadap depopulasi orang Papua. Kajian-kajian terhadap marginalisasi dan depopulasi di Tanah Papua sudah banyak dilakukan oleh para sarjana Barat. Misalnya Tania Li (1999), yang memfokuskan pada dampak pembangunan terhadap peminggiran dan hilangnya identitas OAP. Selain itu, juga Elmslie dan Webb-Ganon (2010) yang menarasikan mengenai *slow motion genocide* sebagai akibat dari depopulasi. Studi terbaru dilakukan oleh LIPI (2019) mengenai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan OPM yang lebih rendah pada kabupaten yang penduduknya didominasi oleh OAP. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk melakukan update terhadap situasi OAP dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Marginalisasi dalam tulisan ini berupa proses-proses sosial OAP menjadi terpinggirkan dalam pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah. Juga termasuk semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk menikmati sumber-sumber ekonomi dan sosial- budaya. Beberapa kajian mengenai persoalan ini sudah banyak ditulis, misalnya oleh Tania Li yang menuliskan bahwa strategi pembangunan Indonesia seringkali melanjutkan kebijakan Belanda yaitu memindahkan OAP dari daerah terpencil atau terisolasi ke daerah yang dapat dikontrol oleh Pemerintah. Kebijakan ini memunculkan kritik karena telah melemahkan kultur komunitas etnis yang menjadi target dan memindahkan mereka dari tanah leluhurnya dan tempat bekerjanya ke dalam suatu tempat baru. Kampung baru tersebut dalam perkembangannya ditandai dengan kemiskinan, pelayanan kesehatan yang kurang, kekurangan gizi, dislokasi budaya, ketergantungan dan keputusasaan.⁴

Aspek lain yang banyak dikaji dari pembangunan di Tanah Papua disampaikan oleh Jim Elmslie pada 2010, bahwa salah satu dampak pembangunan oleh Pemerintah Indonesia adalah depopulasi OAP.⁵ Elmslie memprediksikan bahwa pada 2050, penduduk Tanah Papua akan lebih didominasi oleh pendatang dari luar Papua daripada orang asli, yakni sebanyak 60%. Bahkan, dalam artikel lainnya, Elmslie dan Webb-Ganon mengatakan bahwa fenomena depopulasi ini dapat disebut sebagai *slow motion genocide* terhadap OAP.⁶ Terlepas kita tidak sepakat dengan pandangan ini, perlu kajian yang lebih mendalam apakah benar ada depopulasi OAP pada masa kini. Salah satu kajian terbaru, mengenai perubahan sosial demografi dilaksanakan oleh Tim Penelitian Prioritas Nasional Papua LIPI, dengan bersumber dari Sensus Penduduk 2010, mengambil kasus Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa sekitar 51% penduduk Papua Barat memiliki ayah atau ibu atau kedua-duanya yang berasal dari luar Papua.⁷ Artinya di daerah ini proporsi OAP yang kedua orang tuanya benar-benar dari rumpun ras Melanesia hanya mencapai 49%.

⁴ T. M. Li, "Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia," *Cultural Anthropology*, 14 (3), (1999): 295-322.

⁵ Jim Elmslie, "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" Or Not?" *Centre for Peace and Conflict Studies*, working paper no. 11/1 (2010).

⁶ Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua," *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2014).

⁷ Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk OAP di Papua Barat* (Jakarta: Kedeputusan IPSK-LIPI, 2019).

Penelitian terbaru Tim Peneliti Prioritas Nasional Papua menggambarkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Papua Barat pada periode 2012-2018 sebagai berikut.⁸ Angka kematian bayi di Provinsi Papua Barat mencapai 74 per 1000 kelahiran pada 2012, sedangkan angka kematian balita mencapai 109 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Angka kematian bayi tersebut jauh tinggi dari angka nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita lebih tinggi dari angka nasional 43 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Gambaran lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2 Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Barat

Gambaran Kesehatan Ibu dan Anak	Papua Barat	Indonesia
Angka Kematian Bayi	74/1000 kelahiran (2012)	34/1000 kelahiran (2012)
Angka Kematian Balita	109/1000 (2012)	43/1000 (2012)
Angka Kematian Ibu	233/100.000 (2017)	305/100.000 (2015)
Prevalensi Balita dan Gizi Buruk dan kurang	19,2% (2018)	17,7% (2018)
Prevalensi Balita Stunting	27,8% (2018)	30,8% (2018).

Sumber: BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF (2013), Kemenkes RI (2019), Dinas Kesehatan Papua Barat (2018).

Hasil penelitian tersebut, menyebutkan beberapa catatan yang menunjukkan masih kentalnya tradisi budaya dalam kesehatan yang dianggap belum sesuai dengan perilaku kesehatan modern.⁹ Misalnya, perempuan asli Papua, yang menetap di daerah terpencil dan terisolir atau yang belum memiliki akses ke pelayanan kesehatan, ketika melahirkan anaknya cenderung meminta tolong ke dukun karena tenaga kesehatan dianggap sebagai orang luar. Hal ini terkait dengan masih adanya pantangan membuka bagian tubuh yang sensitif di hadapan orang yang tidak dikenal kecuali anggota keluarga atau dukun yang sudah dikenal, sehingga tenaga kesehatan menjadi alternatif jika sudah tidak ada lagi dukun. Sebagai catatan bahwa deskripsi ini tidak menggambarkan kondisi kesehatan di Tanah Papua secara umum karena ditemukan di Tambrau, daerah pemekaran Kabupaten Sorong. Kondisi ini berbeda tentunya dengan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang relatif lebih maju dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Kemudian terkait dengan pendidikan, pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan memperhitungkan kondisi kesulitan geografis, demografi, sosial budaya OAP belum dilaksanakan. Hal ini diperlihatkan oleh ketidakhadiran guru, sulitnya akses ke sekolah, kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi sosial budaya, kualitas pembelajaran yang tidak memadai, manajemen sekolah yang buruk. Selain itu ada kalanya sekolah dan pendidikan tidak dianggap sebagai hal penting di dalam masyarakat ditambah lagi belum sesuainya pendidikan yang diajarkan dengan kesempatan pasar kerja serta kehidupan siswa sehari-hari (lihat Afriansyah, dkk 2019; Oktafiani dkk., 2019).

Namun, di daerah perkotaan, OAP sudah mengalami perubahan dalam kepedulian terhadap pendidikan anak sebagaimana dilakukan oleh pendatang. Sejak Otonomi Khusus diberlakukan, Pemerintah Papua telah memberikan berbagai skema beasiswa anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di kota-kota di luar Papua, seperti Makassar, Manado, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Juga untuk menempuh pendidikan magister di luar negeri seperti di negara-negara Eropa, Amerika, dan Republik Rakyat Tiongkok. Salah satu hasil pendidikan ini misalnya, Gracia Billy Mambrasar, lulusan Harvard University, diangkat menjadi salah

⁸ Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan*.

⁹ Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan*, 22-23.

satu staf khusus Presiden Jokowi pada 2019. Selain itu, terdapat beberapa nama seperti Samuel Tabuni, direktur Papua Language Institute, dan George Saa yang merupakan generasi muda Papua lulusan pendidikan luar negeri. Sekarang ini, sudah banyak generasi muda Papua terdidik yang bekerja profesional dan masuk ke dalam berbagai sektor pemerintahan baik sipil maupun militer. Kuota rekrutmen polisi dan tentara juga dilakukan terhadap OAP dengan pertimbangan mereka lebih mengerti kultur Papua dibandingkan mereka yang dari luar Papua.

Marginalisasi dan depopulasi yang dijelaskan oleh hasil penelitian di muka terjadi sebelum 2010, tulisan ini akan melakukan *update*, apakah marginalisasi OAP tersebut sudah mengalami perbaikan berubah mengingat Pemerintah terutama pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak melakukan pembangunan baik di Papua maupun Papua Barat.

Marginalisasi OAP dalam Pembangunan

Pembangunan secara historis telah berjalan di Papua sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diteruskan setelah integrasi dengan Indonesia. Pada masa Gubernur Jenderal J. Van Baal (1952-1957), yang juga seorang antropolog Pemerintah Belanda, melalui Dinas Kesehatan melakukan kunjungan ke kampung-kampung untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berkembang dan memberikan pengobatan. Setelah itu, Pemerintah membangun rumah sakit khusus untuk penderita Malaria di Abepura.¹⁰ Pada waktu itu, ekspor sagu ke luar negeri dilakukan dari NNG atau *West Papua*.¹¹ Pada 1960, Belanda sudah memulai kebijakan papuanisasi, untuk mempersiapkan sumber daya OAP dalam birokrasi, politik, dan militer.¹² Jauh sebelum Perang Dunia II dimulai, Pemerintah Belanda mengirimkan berbagai ekspedisi penelitian dan mengawal ekspedisi misionaris sebelum membentuk pos-pos pemerintahan di daerah-daerah yang pada waktu itu belum terbuka untuk dunia luar. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Belanda didahului oleh penelitian antropologi dan banyak bekerja sama dengan para misionaris, sehingga pembangunan dilaksanakan pada skala terbatas tetapi tepat sasaran pada OAP.

Salah seorang dosen di Universitas Cendrawasih (PR) mengemukakan bahwa dari 1969 sampai dengan 2001, akses terhadap pembangunan tidak pernah diberikan pada OAP karena yang terjadi pada masa tersebut adalah transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan operasi militer.¹³ Masa orde baru ia sebut sebagai periode yang hilang, yang seharusnya digunakan untuk membangun manusia Papua. Pembangunan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada pendatang sehingga kehilangan kepercayaan dari OAP. Sebaliknya, Pemerintah menuding bahwa masyarakat adat sebagai penghalang dari pembangunan karena persoalan ganti rugi hak ulayat dan memberikan stigma separatis terhadap mereka yang melawan kebijakan Pemerintah.

Pembangunan pada masa Indonesia memang telah dilaksanakan dengan lebih intensif dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua dalam skala besar ketika OAP belum disiapkan. Hal ini menjadikan ketimpangan sosial yang cukup tajam dan perampasan tanah adat atas nama pembangunan. Setelah Reformasi 1998, pembangunan lebih bersifat kapitalistik dan masif dari sebelumnya, seperti sejumlah pusat perbelanjaan modern, ratusan ruko, restoran mewah. Kota Jayapura, Sorong dan Sentani, misalnya memiliki penampakan yang hampir sama dengan kota-kota di Jawa, lengkap dengan sarana dan prasarana serta pemukiman modern. Mereka yang bekerja dan membeli di pusat-pusat perbelanjaan, kebanyakan ialah warga dari komunitas pendatang daripada OAP. OAP memang memiliki uang dari skema Dana Otsus dan Dana Kampung tetapi karena tidak ada

¹⁰ Bernard Lagowan, "Upaya Belanda Membangun Kesehatan Papua," *Suara Papua*, 25 Oktober 2017. <https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/> dan Cahyo Pamungkas, "Building Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective," *Kapata Arkeologi* 14, no. 1. (2018): 111-122.

¹¹ Wawancara P di Jayapura 15 Januari 2020

¹² Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism*.

¹³ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

tata kelola keuangan yang baik, tidak didampingi oleh pihak yang kompeten, hingga akhirnya membelanjakan dana tersebut untuk konsumsi daripada kegiatan produktif.¹⁴

Diakui bahwa Pemerintah sudah banyak melakukan pembangunan ekonomi di Papua dalam konsep ekonomi kapitalistik, seperti membuka daerah terisolasi, membangun infrastruktur transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, perumahan, energi, dan telekomunikasi. Pemerintah juga telah menarik investasi swasta dalam perkebunan kelapa sawit, perikanan, pertambangan, dan perhutanan. Jika dilihat secara statistik, pertumbuhan ekonomi di Papua lebih banyak mengalami kenaikan sejak 2015 sampai 2018 yakni antara 2,79% sampai 7,17% dan Papua Barat antara 1,51% dan 3,74%.¹⁵ Namun, pertanyaannya adalah untuk siapa pembangunan tersebut dilaksanakan dan apa konsekuensinya terhadap kehidupan dan penghidupan OAP termasuk keberlanjutan habitat ekologi mereka. Pertanyaan ini menjadi pokok persoalan dalam melihat masa depan OAP pada masa kini yang berhimpitan dengan persoalan konflik kekerasan pada sisi lain.

Jika kita telusuri model-model pembangunan sejak masa Orde Baru sampai sekarang, pola dasar yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pola pembangunan nasional, yaitu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan politik penyeragaman tanpa memberi ciri khusus untuk OAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal pengembangan pertanian padi dan budaya konsumsi beras, transmigrasi, dan sejenisnya. Strategi pembangunan di Tanah Papua ini, menurut McGibbon, telah meminggirkan OAP karena menciptakan kesenjangan ekonomi.¹⁶ Terutama kebijakan transmigrasi yang telah mengambil tanah-tanah ulayat OAP secara paksa. Daerah-daerah transmigrasi, seperti Merauke, Sorong, Keerom, Nimbongkrang, dan lain-lain, kemudian berkembang pesat secara bertahap sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua. Sedangkan di perkotaan, sektor-sektor bisnis dikuasai oleh etnis-etnis dari luar Papua yang lebih siap dengan kapital, sumber daya manusia, dan menguasai kultur ekonomi modern. Pengalaman marginalisasi pada masa Orde Baru, ditambah dengan kekerasan politik, justru memperkuat identitas kepapuaan setelah berintegrasi dengan Indonesia.

Setelah rezim Orde Baru jatuh, meskipun Pemerintah telah menerapkan Otonomi khusus sejak 2002 dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, namun peraturan ini tidak mengubah pola-pola dasar pembangunan sebelumnya. Hal ini menjadikan pembangunan belum menyentuh kebutuhan OAP.¹⁷ Pada 2017, Bappenas mulai memasukkan rencana pembangunan berbasis pada tujuh wilayah adat, namun sampai saat ini tidak diikuti oleh program riil yang sungguh-sungguh memperkuat masyarakat adat karena yang terjadi adalah pembangunan yang berbasis pada formasi kapitalisme, berakibat pada dekulturasi dan rekulturasi budaya OAP atau disebut sebagai *ethnocide*.¹⁸ Pembangunan berbasis budaya sebenarnya dapat dipelajari dari praktik-praktik kultural masyarakat adat yang sampai kini masih hidup, terutama di pegunungan. Sayang sekali, konsep ini belum diadopsi Pemerintah sehingga OAP menjadi tersisih dari pembangunan terutama yang ada di perkotaan, mereka menjual tanahnya dan hidup di daerah yang lebih jauh dari perkotaan. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada pola hidup OAP yang semakin konsumtif dengan memanfaatkan skema Dana Respek atau Dana Desa.

Menurut salah seorang akademisi dari Uncen (ER), pembangunan di Tanah Papua memiliki dua wajah.¹⁹ Pada satu sisi terdapat kemajuan yang bersifat fisik seperti membangun jalan, pelabuhan,

¹⁴ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

¹⁵ BPS. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2011–2018* (BPS, 2018). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/964>

¹⁶ Rodd McGibbon, *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and its Place in Australia-Indonesia Relations* (New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006).

¹⁷ Wawancara dengan PK, 16 Januari 2020

¹⁸ J. D. Eller, *Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives* (New York and London: Routledge, 2009) dan lihat juga G. Clarke, "From Ethnocide to Ethnodevelopment? Ethnic Minorities and Indigenous Peoples in Southeast Asia," *Third World Quarterly* 22.3 (2001): 413-436.

¹⁹ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

dan infrastruktur yang megah; namun di sisi lain terjadi marginalisasi OAP di atas tanahnya sendiri. Menurutnya, merujuk pada observasi terhadap masyarakat adat di Depapre, sejak 1970-an setiap jalan selesai dibangun oleh Pemerintah, kelompok pendatang dari luar Papua datang untuk berbisnis dan memanfaatkan jalan tersebut. Dengan kata lain, pembangunan seperti jalan memunculkan paradoks bagi OAP dalam hal manfaat. Pada satu sisi mempermudah akses ke dunia luar dari keterisolasian geografis yang selama ini menjadi penghambat bagi pembangunan, namun pada sisi lain jalan tersebut juga akan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pendatang daripada OAP.

Selain pada aspek manfaat, pembangunan juga memunculkan masalah yang terus menerus belum dapat diselesaikan hingga kini, yakni persoalan hak ulayat, terutama ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan. Dengan demikian, selain marginalisasi secara sosial ekonomi, pembangunan juga mendatangkan pelanggaran hak-hak ulayat dalam bentuk perampasan tanah adat seperti dalam kasus lahan transmigrasi dan penambangan. Hal ini menjadikan wajah pembangunan di Papua adalah marginalisasi dalam bentuk peminggiran OAP oleh komunitas pendatang, terutama di daerah transmigrasi dan kawasan perkotaan.²⁰ Pandangan ini didukung oleh salah seorang tokoh DAP (FA), yang menyampaikan pada tim peneliti bahwa pembangunan di Tanah Papua telah menampilkan wajah buruk yaitu marginalisasi dan diskriminasi di segala bidang termasuk dalam penanganan hukum.²¹

Untuk menghindari marginalisasi dan ketimpangan, seharusnya, Pemerintah memperhatikan narasi-narasi tentang pembangunan berbasis kebudayaan atau masyarakat adat. Menurut salah satu tokoh pemerintahan adat Papua, FA, strategi pembangunan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebudayaan masing-masing kelompok etnis.²² Secara kultural, OAP bukanlah suatu entitas yang bersifat tunggal, namun terdiri dari lebih dari 253 etnis. Kategori lain yang dapat digunakan untuk melihat keragaman etnis adalah kedudukan geografis, yakni masyarakat yang mendiami pantai, rawa-rawa, lembah, dan pegunungan.²³ Pembangunan untuk kelompok masyarakat yang tinggal di gunung mungkin saja berbeda dengan untuk etnis yang tinggal di pantai. FA menceritakan pada penulis bahwa OAP yang berasal dan tinggal di pegunungan tengah belum lama berinteraksi dengan dunia luar. Komunitas ini pertama kali bertemu dengan para misionaris dari Eropa yang tinggal dan hidup bersama mereka. Para misionaris mempelajari bahasa mereka sambil mengenalkan pendidikan, kesehatan, serta agama Kristiani. OAP di pegunungan merasa sangat dihargai dan dimanusiawikan oleh para misionaris ini yang bersedia hidup bersama mereka. Namun tidak lama kemudian, integrasi dengan Indonesia membawa perubahan yang mendasar. Operasi militer pada 1970-an di wilayah ini menjadikan kehidupan mereka mengalami lompatan dari relasi damai ke siklus kekerasan.

Fenomena ini membentuk *memoria passionis*, ingatan kolektif OAP yang tidak tertulis mengenai sejarah penderitaan dan kekerasan yang mereka alami. Sebagian ingatan ini dituliskan dan sebagian lainnya tidak dituliskan. Misalnya, 'di bawah pohon ini, saudara saya disiksa sampai mati dan badannya digantung oleh aparat, di pantai itu saudara perempuan saya diperkosa aparat.'²⁴ Pengalaman dan ingatan tentang kekerasan ini ikut mempengaruhi cara pandangan orang pegunungan dalam melihat Indonesia, termasuk persepsi terhadap etnis dan agama dari luar Papua. Misalnya, ketika mereka melihat sebagian besar pasukan Indonesia orang Melayu dan beragama Islam, mereka

²⁰ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

²¹ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

²² Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

²³ Mansoben, "Sistem Politik Tradisional."

²⁴ Arnold Belau dan Yosef Rumaseb, "Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua," *Suara Papua*, 17 Februari 2018. <https://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan-uskup-muninghoff-dalam-advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/>

menganggap semua orang Islam dan ras Melayu memiliki perilaku yang sama seperti yang dibawa oleh tentara.²⁵

DAP, sebagaimana disampaikan oleh FA, mengatakan bahwa pembangunan bukan sesuatu yang baru, OAP dari dahulu menyadari bahwa dunia terus berkembang, perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik merupakan keniscayaan.²⁶ Namun demikian, mereka menghendaki bahwa pembangunan tersebut harus tumbuh pada manusia yang utama atau manusia Papua sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Hal ini berarti tujuan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan harus mengarah pada penghargaan dan keberpihakan pada manusia. Dalam realitasnya, pembangunan justru menjadikan manusia Papua sebagai objek sehingga mereka terasing, tergusur dan terpinggirkan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai contohnya adalah pembangunan Jalan Trans-Papua yang dipacu oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. OAP menyambut baik pembangunan jalan tersebut dan menyadari bahwa mereka membutuhkan jalan. Akan tetapi kalau yang membangun jalan adalah TNI, maka mereka tidak akan bertanya pada masyarakat: jalan harus melalui jalur mana, dimana tempat-tempat keramat, masyarakat adat mana yang dilalui jalan ini.

Pertanyaan kalangan DAP adalah pembangunan ini untuk siapa. Mereka membutuhkan pembangunan, namun ia harus diletakkan pada manusia Papua yang utama. Menarik investasi asing sebagaimana ditulis dalam RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan wilayah Papua adalah suatu yang kontradiktif. OAP sudah kehilangan tanah, budaya, dan bahkan jiwanya karena pembangunan. Pembangunan tidak boleh merampas tanah, menghancurkan tradisi kebudayaan bahkan menghilangkan nyawa manusia Papua. Sebaliknya, pembangunan berdasarkan kebudayaan ialah harus bertumpu pada kemanusiaan. OAP tidak menolak pembangunan karena mereka menyadari membutuhkan sekolah dan rumah sakit, namun mereka harus dijaga harkat dan martabat kemanusiaannya.

Untuk mencegah marginalisasi OAP, Pemerintah seharusnya melakukan analisis siapa yang akan menerima manfaat pembangunan di Tanah Papua. Salah seorang aktivis kemanusiaan di Jayapura (YL)²⁷ memaparkan pandangan OAP di Depapre terkait jalan yang mereka butuhkan sebagai berikut:

Pemerintah bangun jalan raya tapi yang mereka butuhkan jalan yang mampu mengangkut hasil hutan, ladang, kebun ke pasar agar mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Juga jalan yang dapat mempermudah anak-anak pergi ke sekolah. Masyarakat merindukan jalan raya dan listrik, ada kesadaran agar mereka gampang pergi ke kota. Gereja melihat betapa polosnya masyarakat di kampung, tidak memiliki gambaran bahwa jalan memudahkan migran masuk dan membawa barang-barang yang dijualnya. Mereka yang memiliki kesadaran akan eksistensi orang Papua mungkin hanya 0,000%, hanya satu atau dua orang yang akan bicara, nanti pendatang masuk bikin kios, kita kasih tahu dampaknya. Seharusnya sebelum ada jalan, kapasitas mereka OAP kita tingkatkan, dengan cara duduk dan berita-cerita.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jalan yang dibutuhkan OAP bukanlah jalan dalam skala besar tetapi jalan dalam skala terbatas yang mampu memudahkan perjalanan mereka dari kampungnya ke pasar di ibu kota distrik atau ibu kota kabupaten. Jalan dalam skala terbatas yang memudahkan anak-anak Papua pergi ke sekolah dengan mudah. Dengan kata lain jalan yang dibutuhkan lebih pada jalan dari kampung ke kota-kota yang selama ini masih terisolasi, dan bukan jalan yang menghubungkan antara pegunungan dan pantai seperti sekarang. Walaupun jalan tersebut

²⁵ C. E. Farhadian, *Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia* (London: Routledge, 2005); dan Cahyo Pamungkas, "Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua," Tesis Magister Sosiologi FISIP UI, Depok, 2008.

²⁶ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

²⁷ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

juga diperlukan tetapi kalau manusia Papua belum siap sumber dayanya justru akan membuat mereka terancam karena memicu persaingan dengan kelompok-kelompok pendatang dari luar Papua. Dengan jalan semakin bagus, maka kelompok pendatang akan semakin mudah menjual komoditasnya dari kota ke kampung-kampung atau membeli kayu dan hewan buruan dari kampung dibawa ke kota.

Sayangnya kesadaran seperti ini masih belum kuat untuk sebagian masyarakat di pantai karena mereka akan percaya sesudah melihat dampaknya terjadi di depan mata. Hal yang sering dilupakan sebelum membangun infrastruktur adalah penyiapan sumber daya manusia sehingga mereka siap dalam menyambut perubahan sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan OAP di daerah pesisir, OAP di pegunungan terutama orang Mee dan Hubula bersikap lebih kritis dalam menyambut Jalan Trans-Papua. Mereka sejak awal menyatakan bahwa Jalan Trans-Papua merupakan salah satu ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat karena mereka belum siap dengan membanjirnya berbagai komoditas yang membawa dampak negatif seperti miras dan narkoba, atau komoditas yang menyaini seperti babi ternak.²⁸ Pengalaman menunjukkan bahwa ketika pembangunan jalan trans, tenaga kerja yang digunakan lebih banyak orang dari luar Papua termasuk kontraktornya, meskipun beberapa OAP juga terlibat.

Menurut YL, senada dengan VT, bahwa desain pembangunan yang dipraktikkan Indonesia di Tanah Papua selama ini telah melebarkan kesenjangan.²⁹ Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah pendatang ke Tanah Papua. Logika yang dibangun adalah OAP memerlukan waktu sesaat untuk memberikan kesempatan pada mereka menjadi pelaku, pemilik, dan penerima manfaat dari pembangunan. OAP menyadari bahwa pembangunan tidak bisa ditolak, atau orang akan meninggal jika tidak ada rumah sakit yang berkualitas di sekitarnya, atau jika tidak ada transportasi yang memudahkan mereka berobat, atau jika tidak tersedia obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan termasuk membangun jalan. Jika diserahkan pada swasta, maka pihak perusahaan cenderung memiliki motif penguasaan sumber daya OAP. Sebagai contoh kasus di Arso, pihak perkebunan bersedia membangun jalan 2,5 km di Arso Kota tetapi meminta lahan OAP untuk kelapa sawit seluas 18.339 Ha sebagai kompensasinya.

Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah membangun jalan tidak sampai ke pemukiman OAP hanya sampai ke Satuan Pemukiman Transmigran. Perusahaan sawit tersebut kemudian meminta masyarakat untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Kemungkinan eksploitasi ada di setiap pembangunan, maka pembatasan pendatang menjadi suatu kebutuhan. Walaupun tidak dapat, langkah lain adalah melarang penjualan tanah pada pendatang cukup hak guna saja. Strategi ini pernah dicoba oleh MRP, dengan mengusulkan Perdasi pembatasan pendatang tetapi gagal disahkan oleh Pemerintah Papua karena menuai kontroversi dan juga tekanan dari Jakarta karena Papua sebagai bagian dari Indonesia maka Pemerintah tidak boleh membatasi kebebasan bergerak warga Indonesia dari luar Papua ke Tanah Papua.

Pengendalian penduduk, terutama penduduk dari luar Papua yang masuk ke Tanah Papua, perlu dilakukan sehingga mereka yang datang ke Papua harus memiliki tujuan dan kontribusi yang jelas untuk OAP serta diberi waktu berapa lama tinggal. Hal ini dilakukan agar pendatang di daerah ini tidak menjadi beban pembangunan yang semakin berat. Sejumlah Perdasi terkait pembatasan penduduk dari luar dapat diimplementasikan setelah didiskusikan dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat dengan pertimbangan perlunya jeda sesaat memberikan kesempatan agar OAP dapat berkembang dan mengembangkan dirinya.

Pembangunan yang dibutuhkan OAP adalah pembangunan yang mampu memperkuat posisi masyarakat adat menjadi tuan di tanahnya sendiri. Salah seorang tokoh dan pendiri DAP menyebutkan

²⁸ Pamungkas, "Building Social Resilience."

²⁹ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivist HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020; dan Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

bahwa indikator pembangunan bagi OAP seharusnya diukur dari sejauh mana mereka merasakan perdamaian dan kebebasan sehingga menikmati kehidupan secara layak. Secara komunal ialah, masyarakat adat harus menjadi sentral dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerima manfaat dari pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang melekat pada mereka, terutama di kampung-kampung. Sebagai contoh, setiap kampung di Papua memiliki sejumlah cerita rakyat, sumber alam, dan potensi ekonomi, apakah Pemerintah telah mengakui pembangunan yang dijalankan telah memberi ruang untuk pengembangan berbasis masyarakat adat, atau apakah telah memberikan ruang bagi hak kepemilikan masyarakat adat yang semakin kuat. Pada praktiknya justru pembangunan menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah atau tanah secara paksa atau sukarela diberikan oleh masyarakat adat pada pihak lain yang tidak dapat bertanggung jawab dan memberikan dampak negatif. Pembangunan dimanipulasikan sehingga tidak memberikan tempat yang layak bagi masyarakat adat.³⁰ Informan ini kemudian mengatakan sebagai berikut:

Pada tahun 2005, ketika saya pulang [ke Serui], saya menikmati suasana masa kecil yang indah seperti pergi ke laut bersama om saya untuk memancing. Inilah satu suasana yang luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali ikan kakap. Saya membayangkan kalau ikan ini dijual pasti harganya 100,000-250,000 per ekor. Tapi saya tidak berpikir untuk itu dijual. Saya mau menikmati hasil pancingan saya yang segar itu. Ketika saya membutuhkan ubi sudah tersedia di depan rumah. Karena berkecukupan dengan ikan kakap dan ubi yang segar dan sehat. Ada satu ubi yang ditanam yang cukup besar yang dapat dimakan oleh satu keluarga. Ketika saya tidur di hotel berbintang lima, saya tidak merasakan makanan yang enak seperti ketika saya di Kampung dan mengalami suasana cuaca dan udara yang segar. Nilai kehidupan seperti ini tidak pernah dihargai, dalam proses pembangunan karena dollar menjadi standar penilaian dan pusat-pusat ekonomi membawa persaingan dan memotong cara hidup masyarakat adat. Pembangunan cenderung merusak alam, dampak dari proses pembangunan yang berdasarkan nilai dolar. Dari PTFI negara mengusur masyarakat adat karena itu pembangunan mendorong marginalisasi masyarakat adat.

Informan ini mengilustrasikan bahwa pembangunan seharusnya menciptakan suasana kedamaian seperti yang dialami oleh masyarakat adat tidak hanya menekankan pada dimensi ekonomi semata. Suasana damai seperti anak-anak kecil yang berbaring di perahu pada intinya ialah tujuan pembangunan yakni mencapai kebahagiaan, yang dilakukan dengan tanpa mengusur tanah ulayat atau memindahkan tempat hidup mereka atau memaksa perubahan cara hidup mereka. Juga terkait dengan ketahanan pangan, pembangunan tidak boleh melakukan standarisasi dan penyeragaman dalam konsumsi. Kalau OAP memilih memakan sagu, patatas, keladi, dan sejenisnya, tidak perlu dipaksa untuk menjadikan beras sebagai makanan pokok. Aspek terakhir yang paling penting ialah pembangunan di Papua tidak boleh merusak habitat ekologis, karena alam tersebut merupakan tempat hidup manusia Papua. OAP hidup tergantung dengan alam, menceraub mereka dari habitatnya ekologisnya seperti yang dialami oleh Suku Amungme di Mimika berarti merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia Papua.³¹

Penyeragaman adalah kata kunci dalam pembangunan di Indonesia, pembangunan ekonomi dan sosial-budaya tidak dilakukan dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya masyarakat setiap provinsi. Leonard Imbiri menceritakan bahwa ketika dirinya berkunjung ke negara-negara Melanesia

³⁰ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

³¹ Harry Surjadi & Angel Manembu, "Arti Tanah bagi Orang Papua," *Kompas*, 25 September 1995. Dimuat kembali dalam <http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi-suku-amungme.html>

seperti Solomon dan Vanuatu, ia melihat nuansa yang berbeda.³² Misalnya konsep transportasi, bukan berarti infrastruktur yang mewah tetapi sarana transportasi tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah. Begitu ada orang tenggelam di lepas pantai, tim patroli penjaga pantai dengan cepat memberikan pertolongan. Pembangunan di Melanesia berarti bukan mengejar sesuatu melampaui kapasitasnya. Kondisi di Papua cukup berbeda, banyak Puskesmas atau rumah sakit dibangun dengan mewah tetapi hanya ada satu atau dua dokter yang menangani pasien; jalan dibangun dimana-mana tetapi OAP tidak dapat lewat karena biayanya mahal karena harus menyewa mobil double gardan. Pembangunan hanya menyenangkan imajinasi tetapi belum menyentuh persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat adat Papua.

Menurut Leonard Imbiri, pembangunan Jalan Trans-Papua ini cenderung akan memarginalkan masyarakat adat Papua.³³ Menurut pengamatannya di sepanjang Trans-Papua di Jayapura, ia mengamati ada 100 kendaraan roda empat dimana 92% dikemudikan oleh pendatang dan sisanya orang asli. Juga terdapat 100 sepeda motor yang dikemudikan oleh pendatang 50% dan orang asli 50%. Kalau dilihat dari jenis motornya, motor yang dikendarai OAP rata-rata lebih baik, sedangkan motor yang dikendarai pendatang digunakan untuk mengangkut barang dagangan. Informan dari Uncen (PR) mengatakan bahwa tidak semua OAP setuju dengan Jalan Trans-Papua karena penerima manfaatnya lebih banyak pendatang.³⁴ Pengguna jalan trans akan membayar Rp15 juta per mobil double gardan untuk membawa barang-barang industri dan berjalan beriringan antara 5 atau 6 mobil dari Jayapura ke Wamena. Masyarakat menganggap jalan ini untuk menguasai sumber daya OAP, memperlancar aktivitas ilegal, dan memfasilitasi pendatang untuk menembus dan menguasai ekonomi pelosok-pelosok Papua dengan mudah.

Pembangunan Trans-Papua, ketika melalui daerah pemekaran belum ada penyiapan sosial masyarakat yang dilalui jalan ini. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat adat di sepanjang Jalan Trans-Papua masih minim kecuali hanya jualan pinang dan bensin dalam skala kecil dan terbatas. Seharusnya Pemerintah Pusat mengadakan dialog dengan gubernur, bupati, dan masyarakat adat sebelum membangun jalan trans ini untuk menyusun perencanaan. Masyarakat adat membutuhkan jalan dalam skala kecil karena jalan dengan skala besar dibangun dengan kerangka kepentingan pemodal besar untuk membawa logistik dengan kendaraan-kendaraan besar. Hal ini mengakibatkan para pemodal yang menjadi penerima manfaat terbesar dari Jalan Trans-Papua. Pandangan Leonard Imbiri diperkuat oleh SW, salah seorang aktivis Gereja dari Timika.³⁵

Soalnya saya lihat dan alami bahwa semua infrastruktur yang dibangun tidak pernah menjawab kepentingan orang OAP. Kalau mau bilang suatu pembangunan itu berhasil maka juga harus membangun orang asli daerah tersebut, pemanfaatannya dirasakan juga oleh orang asli. Orientasi pembangunan di Papua yang terpusat di daerah transmigrasi telah memangkas pertumbuhan kampung dan warga asli. Jika orientasi ini tidak diubah, maka selalu akan menjadi pembangunan orang Bugis di Papua, orang Jawa di Papua, orang Batak di Papua, dan lain-lain. Lantas dimana posisi OAP? Kami ada di tempat yang tidak terjamah oleh pembangunan.

Strategi pembangunan yang belum berpusat pada manusia dan kebudayaan ini telah mengasingkan OAP dari pembangunan itu sendiri. Menurut Leonard Imbiri, sebagian OAP mengalami disorientasi identitas sebagai akibat dari disorientasi pembangunan.³⁶ Kalau dulu mereka bekerja di

³² Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

³³ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

³⁴ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

³⁵ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan SW, Aktivis Gereja di Timika, 30 Januari 2020.

³⁶ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

kebun sekarang memilih membuat proposal dan meminta dana ke Pemerintah Daerah atau menjual tanahnya pada pendatang. Contoh lainnya adalah menjual pisang mentah untuk membeli pisang goreng atau menjual ikan segar untuk membeli ikan sarden. Disorientasi budaya ialah pembangunan telah mencabut masyarakat adat dari akar-akar budayanya, sehingga menjadikan mereka kebingungan antara meninggalkan nilai yang lama atau menganut nilai baru yang belum ada pegangannya.³⁷ Fenomena yang paling sering terjadi masa kini ialah pemekaran kampung tanpa melalui penyiapan sosial sehingga tidak semua kampung mampu berkembang walaupun berada di sepanjang Jalan Trans-Papua.

Depopulasi OAP dan Akibatnya

Marginalisasi yang berkelanjutan terhadap OAP di atas tanahnya sendiri menjadikan mereka secara berkala ter-depopulasi oleh pendatang di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, persoalan pendatang di Papua pada masa kini merupakan masalah yang diwariskan oleh Orde Baru. Pada 1971 terdapat 5.000 orang yang bertransmigrasi, kemudian terjadi peningkatan di 1972 yang mencapai 10.000 orang.³⁸ Data menunjukkan hingga 1979, total transmigran mencapai 560.000 orang. Kebijakan transmigrasi terus dilaksanakan sampai 2000 ketika aspirasi Papua merdeka meluas dalam ruang publik. Selain transmigrasi, migrasi spontan juga terjadi di Papua, terutama dari masyarakat Bugis, Buton, dan Makassar (BBM).

Baik transmigrasi dan migrasi spontan telah mengubah komposisi penduduk Papua. Jika tahun 1971 jumlah pendatang mencapai 4% dari total penduduk, maka pada 2000 mencapai 35% dari seluruh penduduk di Tanah Papua. Pada 1980, total jumlah pendatang dibandingkan dengan jumlah penduduk kota-kota di Papua telah mencapai 30% dan meningkat menjadi 66% pada 2000. Elmslie menyebutkan bahwa penduduk Papua pada 1971 sebanyak 887,000 jiwa meningkat menjadi 1,505,405 pada 2000 atau rata-rata pertumbuhan 1.84% per tahun.³⁹ Sedangkan penduduk pendatang meningkat dari 36,000 jiwa pada 1971 menjadi 708,425 pada 2000 atau tumbuh 10,82% rata-rata per tahun. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk Papua asli menempati posisi minoritas pada kota-kota besar terutama di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Biak Numfor.⁴⁰ Pada tahun ini juga, mayoritas (sekitar 86%) OAP menetap di daerah pedesaan dan pegunungan-pegunungan. Michael Rumbiak, seorang peneliti dari Papua yang tinggal di Australia, sebagaimana dikutip mengatakan bahwa kebijakan transmigrasi oleh Orde Baru bertujuan untuk "depopulation" OAP.⁴¹

Meningkatnya jumlah pendatang dapat dilihat dari tempat ibadah seperti masjid dan mushola yang menjamur di kota-kota besar di Tanah Papua. Juga banyaknya denominasi gereja yang berasal dari luar Papua. Salah seorang informan mengatakan jumlah pendatang dapat dilihat pada jemaah gereja-gereja di Kota Jayapura yang hampir 80% merupakan warga pendatang. Selain itu juga dapat dilihat dari penghuni perumahan-perumahan yang dibangun seperti di Sentani yang sebagian besar dimiliki dan ditempati pendatang.⁴²

Berdasarkan penelitian Ananta dkk. pada 2016 mengenai tingkat fraksionalisasi dan tingkat polaritas penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat diidentifikasi bahwa tingkat heterogenitas etnis (EFI) di Provinsi Papua sangat tinggi (0,91), namun tingkat polaritas etnis (EPOI) masih cukup rendah (0,29).⁴³ Etnis dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini adalah Dani (23,32%) dan proporsi OAP di tingkat provinsi masih cukup besar (76,31%). Proporsi pendatang yang lebih besar

³⁷ R. K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968).

³⁸ McGibbon, *Plural Society in Peril*, 20.

³⁹ Elmslie, "West Papuan Demographic Transition."

⁴⁰ Elmslie, "West Papuan Demographic Transition," 26.

⁴¹ McGibbon, *Pitfalls of Papua: Understanding*, 19.

⁴² Wawancara dengan P, Jayapura 15 Januari 2020

⁴³ A. Ananta, D. R. W. W. Utami, dan N. B. Handayani, "Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(3), (2016): 458-474.

dari OAP dapat ditemukan di Kabupaten Merauke, Nabire, Mimika, Keerom, dan Kota Jayapura. Sedangkan di kabupaten lain rata-rata proporsi OAP masih cukup tinggi seperti di wilayah adat La Pago, Saireri, Anim Ha kecuali Merauke, Mee Pago (kecuali Nabire dan Mimika). Sedangkan sejumlah kabupaten di wilayah adat Pegunungan Tengah atau La Pago, rata-rata memiliki tingkat homogenitas etnis yang cukup tinggi atau heterogenitas yang cukup rendah, dengan angka EFI yang di bawah 0,33 seperti Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, dan Memberamo Tengah.

Tabel 3.3 EFI dan EPOI Provinsi Papua hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Provinsi/Kab/Kota	EFI	EPOI	Etnis Terbesar	%	OAP %
	Provinsi Papua	0,91	0,29	Dani	23,32	76,31
1.	Merauke	0,84	0,46	Jawa	34,32	37,27
2.	Jayawijaya	0,32	0,49	Dani	82,02	90,79
3.	Jayapura	0,92	0,27	Sentani	18,15	61,48
4.	Nabire	0,89	0,36	Jawa	22,21	47,54
5.	Kepulauan Yapen	0,74	0,58	Yapen	47,86	78,09
6.	Biak Numfor	0,50	0,62	Biak Numfor	69,89	73,82
7.	Paniai	0,11	0,20	Auwye	94,50	97,58
8.	Puncak Jaya	0,11	0,20	Dani	94,31	98,24
9.	Mimika	0,93	0,24	Mimika	12,95	42,51
10.	Boven Digul	0,88	0,41	Mandobo	21,48	66,95
11.	Mappi	0,65	0,74	Asmat	53,58	88,62
12.	Asmat	0,29	0,45	Asmat	84,26	89,59
13.	Yahukimo	0,71	0,66	Ngalik	48,60	98,58
14.	Pegunungan Bintang	0,66	0,81	Ngalum	42,61	95,31
15.	Tolikara	0,03	0,07	Dani	98,31	99,05
16.	Sarmi	0,94	0,22	Biga	14,56	70,25
17.	Keerom	0,85	0,42	Jawa	34,34	41,33
18.	Waropen	0,71	0,62	Waropen	51,32	79,59
19.	Supiori	0,11	0,20	Dauwa	94,55	96,48
20.	Memberamo Jaya	0,86	0,42	Dani	31,74	93,07
21.	Nduga	0,04	0,08	Dani	97,90	99,16
22.	Lanny Jaya	0,05	0,09	Ngalik	97,62	99,90
23.	Memberamo Tengah	0,34	0,63	Dani	78,98	99,47
24.	Yalimo	0,07	0,13	Ngalik	96,55	99,20
25.	Puncak	0,52	0,74	Dani	65,99	99,26
26.	Dogiyai	0,03	0,06	Auwye	98,35	99,01
27.	Intan Jaya	0,42	0,66	Moni	74,29	99,81
28.	Deiyai	0,04	0,08	Auwye	97,83	98,94
29.	Kota Jayapura	0,93	0,24	Jawa	19,17	34,91

Sumber: Aris Ananta dkk. (2016).

Pada tingkat provinsi, Penduduk Papua Barat tampak sangat heterogen (EFI=0,95) tetapi tidak terpolarisasi ke dalam dua atau tiga kelompok etnis, atau dapat dikatakan sangat terfragmentasi (EPOI 0,19). Kelompok etnis terbesar di provinsi ini adalah Jawa (14,76%) dan proporsi penduduk non-

Papua adalah 51,49% di Papua Barat. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat heterogenitas etnis sangat tinggi, lebih dari 0,90 adalah Kaimana, Teluk Bintuni, dan Kota Sorong. Dari ketiga daerah tersebut proporsi OAP yang paling besar adalah di Bintuni, yakni kelompok etnis Aikwakai (20,33%) lebih tinggi dari Irarutu di Kaimana (15,50%). Sedangkan kelompok etnis terbesar di Kota Sorong ialah Jawa (13,79%). Namun, kehadiran pendatang di Fak-fak, Kaimana, dan Raja Ampat merupakan kasus lain karena mereka telah berinteraksi dengan OAP sejak abad ke-17 melalui perdagangan dan ekspedisi Sultan Tidore.⁴⁴ Etnis terbesar di Kota maupun Kabupaten Sorong ialah Jawa. Hal ini karena Kabupaten Sorong merupakan penerima transmigrasi terbesar di Papua Barat, sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Bintuni merupakan pusat industri yang menarik tenaga kerja dari luar Papua.

Tabel 3.4 Derajat Fraksionalisasi dan Polarisasi Etnis di Provinsi Papua Barat Hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Provinsi/Kab/Kota	EFI	EPOI	Etnis terbesar	%	OAP %
	Papua Barat	0,95	0,19	Jawa	14,76	51,49
1.	Fak-fak	0,86	0,41	Baham	32,39	47,61
2.	Kaimana	0,94	0,23	Irarutu	15,50	51,56
3.	Teluk Wondama	0,85	0,44	Wandamen	34,22	73,57
4.	Teluk Bintuni	0,91	0,30	Aikwakai	20,33	52,97
5.	Manokwari	0,86	0,44	Arfak	29,90	56,59
6.	Sorong Selatan	0,85	0,46	Tehid	30,87	83,08
7.	Sorong	0,80	0,52	Jawa	41,46	36,07
8.	Raja Ampat	0,79	0,52	Biak-Numfor	42,49	73,4
9.	Tambrauw	0,43	0,70	Karon	73,19	94,99
10.	Maybrat	0,41	0,71	Ayfat	74,05	95,4
11.	Kota Sorong	0,94	0,22	Jawa	13,79	29,93

Sumber: Aris Ananta dkk. (2016)

Depopulasi juga disebabkan karena OAP belum dapat efektif memanfaatkan hasil pembangunan. Menurut informasi dari salah seorang akademisi Uncen (ER), pendatang lebih siap dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan karena masih ada kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mengutamakan atau memprioritaskan kelompok migran seperti dalam penerimaan PNS dan dukungan politik terhadap anggota DPRD terutama di Kabupaten Keerom.⁴⁵ Wilayah ini menyerupai sebuah kabupaten Jawa di Tanah Papua, dimana sebagian besar penduduknya merupakan bekas transmigran. Sedangkan Kota Jayapura yang perlahan-lahan didominasi oleh pendatang terutama Bugis, Buton, Makassar, Jawa, dan Sumatera, juga mengalami pengalaman yang sama. Banyak rekrutmen PNS dan calon-calon anggota DPRD diisi oleh pendatang. Hal ini salah satunya karena mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang cukup kuat.

Faktor lainnya ialah proses adaptasi masyarakat pendatang terhadap perubahan cukup pesat, sedangkan orang asli tidak siap dengan dampak investasi dan pembangunan skala besar yang masuk ke wilayah masyarakat adat. Di hampir seluruh pelosok Papua, komunitas pendatang dari luar Papua terkenal memiliki kelebihan dalam modal dan SDM sehingga mampu menguasai sektor ekonomi. Pada umumnya mama-mama Papua, sebagai pelaku ekonomi di *grass root*, belum memiliki orientasi profit sehingga tidak cocok dengan ekonomi pasar. Mereka lebih memiliki orientasi nilai sosial budaya

⁴⁴ M. S. Widjojo, "Cross-Cultural Alliance-Making and Local Resistance in Maluku during the Revolt of Prince Nuku c. 1780-1810," Disertasi Doktoral TANAP (Towards A New Age of Partnership), IGEER, Department of History, Faculty of Arts, Leiden University, 2007.; lihat juga Pamungkas, "Papua Islam dan Otonomi."

⁴⁵ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

karena harus menanggung kebutuhan anggota klannya seperti membiayai sekolah, berobat ke rumah sakit, acara-acara adat, dan lain sebagainya.

Pasca kerusuhan rasial di Jayapura 2019, muncul sedikit ketegangan antara komunitas OAP terutama yang berasal dari pegunungan dengan komunitas pendatang yang tergabung dalam Paguyuban Nusantara. Kelompok ini terdiri dari berbagai suku, termasuk Jawa, Sumatra, Bugis, Buton, Makassar, juga Maluku, Timor, Minahasa, Toraja dan Batak. Orang Thabi, yang merupakan penduduk asli Kota Jayapura misalnya justru terdesak dalam konflik antara kedua kelompok ini. Pasca kerusuhan rasial, identitas OAP baik gunung dan pantai mulai menguat melalui ekspresi simbol-simbol budaya untuk membedakan dengan pendatang. Misalnya simbol Bintang Kejora, slogan 'spirit Melanesia,' memakai noken, berambut gimbal, lagu *reggae* atau musik hip-hop, dan sejenisnya. OAP membutuhkan sebuah identitas kolektif yang berfungsi menjadi daya hidup atau memberikan energi dan mengarahkan agar komunitas besar OAP dapat berjalan melangkah ke depan. Pada masa lalu Arnold Ap berusaha mengumpulkan lagu-lagu OAP dan membentuk grup musik Mambesak yang sering pentas di RRI Jayapura. Namun kemudian Arnold Ap dibunuh oleh TNI pada 1982 karena dugaan menjadi anggota kelompok OPM. Pada 1999-2000, Theys H. Eluay memobilisasi simbol-simbol Papua dengan menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Kongres II Rakyat Papua pada 2000. Namun ia juga dibunuh oleh anggota Kopassus pada 2002. Setelah Theys terbunuh, nasionalisme Papua tidak hilang tetapi bertransformasi menjadi kebudayaan yang menyebar ke seluruh Papua terutama di kalangan generasi muda.

Menurut keterangan dari salah satu dosen Uncen (VT), dari segi SDM, komunitas pendatang memiliki sifat bekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan fokus pada bisnis, serta dapat bertahan hidup di mana saja.⁴⁶ Sebagai contoh, setelah kerusuhan rasial dimana ruko mereka dibakar, pendatang segera membuka kembali bisnisnya dan tidak menyerah pada situasi, bahkan mereka menerima ganti rugi walaupun tidak besar. Hal ini berbeda dengan OAP yang mengalami trauma pasca kerusuhan. Orang asli mengalami kesulitan untuk mencontoh semangat pendatang dalam kerja keras karena beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, OAP terbiasa hidup relatif lebih enak pada masa Belanda yang menyediakan keju, mentega, dan kebutuhan lain dengan gratis setiap minggu; sehingga mereka tidak perlu bekerja keras. *Kedua*, alam yang menyediakan OAP bergantung hidupnya seperti hewan buruan dan sagu. Namun, pada masa Orde Baru dengan alih fungsi lahan, OAP menjadi tergusur perlahan-lahan dari habitatnya. Dengan demikian, OAP belum siap menghadapi perubahan yang sangat cepat ini karena sudah terbiasa hidup bergantung pada alam.

Kondisi OAP yang 'termarginalkan secara ekonomi oleh pembangunan modern' menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Salah seorang informan dari Uncen (PR) menceritakan OAP semakin lama semakin terpinggirkan dalam kehidupan modern.⁴⁷ Tanah yang seharusnya menjadi hak ulayat dan bersifat komunal kini dibagi-bagi per keluarga dan dijual ke pendatang. Misalnya tanah di sekitar jembatan hotel kamp, dijual satu petak: 8x12 meter dengan harga Rp12 juta. Sebaliknya pendatang hampir di semua tempat di Papua memiliki daya tahan yang cukup tinggi, sedangkan orang asli cenderung menjual tanahnya kepada mereka. Penjualan tanah dimungkinkan jika ada persetujuan dari pemilik tanah dan kepala suku. Selain itu, terdapat pelepasan adat ditandatangani oleh kepala lingkungan dan kepala kampung serta Kepala Kantor BPN setempat.

Menurut YL, seorang aktivis HAM di Sentani, perlawanan terhadap dominasi ekonomi pendatang telah muncul di Manokwari dan Jayapura⁴⁸ Misalnya mama-mama asli Papua memprotes pendatang dan minta proteksi Pemerintah Daerah, yaitu pendatang tidak boleh menjual komoditas khas OAP: noken, pinang/sirih, serta sagu. Menurut keterangan dosen Uncen (VT), mama-mama Papua

⁴⁶ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

⁴⁷ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

⁴⁸ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

sebetulnya adalah pelaku perekonomian OAP yang riil dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹ Mereka membuat noken karena hanya memiliki uang yang terbatas untuk modal membeli benang. Sayangnya Pemerintah belum memberdayakan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan modal yang terbatas mereka hanya mampu menjual pinang atau membeli benang noken. Mereka memiliki beban ganda baik bekerja di kebun, membuat noken, atau menjual pinang sambil tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, noken, pinang/sirih, dan sagu harus dijual oleh OAP sebagai bagian dari proteksi ekonomi paling mendasar. Pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa protes mama-mama Papua seperti ini terdapat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Saosapor, ibu kota Kabupaten Tambrauw pada bulan Juli 2019.

Selain itu, terdapat gerakan dari anak-anak muda yang kembali dari kota ke kampung. Mereka melakukan refleksi dan mengakui adanya krisis identitas OAP yang mulai tercerabut dari akar kebudayaannya. Mereka tidak menolak, bahkan ikut pembangunan karena ingin hidup lebih sehat, menginginkan agar angka harapan hidup tinggi, dan dapat bekerja kebun walaupun jarak ke kebun cukup jauh. Selesai sekolah, sebagai anak-anak muda sudah banyak yang kembali kampung. Mereka membuat media film dan diskusi-diskusi dengan komunitas di Papua dan Papua Barat. Mereka mengadakan festival film untuk mengembalikan manusia Papua yang memiliki akar kebudayaannya seperti orang Hubula di lembah Baliem. Salah seorang aktivis Fransiskan Papua, BK mengatakan *“Kami sebagai pendatang walau kerja di SKPKC, saya ini pendatang, suatu saat akan pulang, jadi kamu yang teruskan, jadi masing-masing harus aktif, kita harus berjuang ruang ini harus direbut, ruang ini harus kamu rebut kembali, jangan biarkan perampasan lahan oleh orang dari luar.”*⁵⁰ Gerakan ini juga membangun kesadaran bahwa anak-anak muda setelah selesai sekolah di kota harus kembali ke kampungnya masing-masing membangun daerahnya dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada serta mengelola tanah agar tidak dijual ke pendatang atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Hal ini penting karena tanpa tanah, OAP akan semakin terpinggirkan dan tidak akan memiliki masa depan di Papua.

Menurut YL, pendatang menggunakan strategi budaya untuk mendekati OAP sehingga mereka dapat dipengaruhi secara ekonomi atau politik.⁵¹ Misalnya, mereka sering mengantar bahan makanan dan minuman seperti beras, gula, kopi, indomie, dan sarden. Setelah itu, mereka minta untuk menyewa tanahnya dibangun ruko dengan dibayar sesuai harga yang berlaku. Setelah beberapa tahun karena hutang budi pada pendatang tersebut, pemilik tanah sering kali menjual tanah yang dipakai ruko pada pendatang. Cerita lain mengisahkan seorang pendatang yang menang dalam Pemilu DPR di Kabupaten Jayapura pada 2019, sebagai berikut:

Seorang calon anggota DPR RI dari pendatang menang di Sentani, Ibu Kota kabupaten Jayapura. Ia kalau ada duka selalu melayat dan membantu yang sedang duka, kalau ada hajatan selalu datang, kasih sumbangan, kita ini susah bilang ke orang kampung, bahwa mereka sedang dieksploitasi untuk kepentingan politik. Orang kampung tulus, kalau ada yang sakit dikasih uang, dibantu mobil ambulans, dibayarin rumah sakitnya. Kemudian, mereka dieksploitasi habis-habisan tanahnya dibeli dan suaranya juga dibeli.

Pendatang lebih siap dengan pembangunan, menurut informasi pimpinan DAP, Leonard Imbiri, karena konsep pembangunan adalah konsep pendatang.⁵² OAP tidak memiliki pikiran untuk bertempat tinggal di ruko, akan tetapi tinggal di rumah bersama keluarga. Sedangkan pendatang terbiasa tinggal di ruko, tempat hidup sekaligus tempat berdagang. Fenomena seperti ini, untuk menghindari marginalisasi dan

⁴⁹ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

⁵⁰ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara BK, pada 17 Januari 2020.

⁵¹ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivist HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

⁵² Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

depopulasi, perlu penyiapan sosial OAP dengan menggunakan konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat adat. Leonard Imbiri dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut.

Contoh lagi, anda datang ke sini bangun jalan, coba suruh OAP kerja jalan, OAP tidak akan kerja, malah akan meminta ganti rugi atas tanah yang dibuat untuk jalan. OAP memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Pemerintah ingin bangun lapangan terbang, maka jadikan lapangan terbang itu milik mereka, sehingga mereka akan ikut kerja dan merelakan tanahnya. Kalau jalan itu milik Pemerintah, kau harus bayar kitorang punya tanah. Hari ini Pemerintah bangun jalan Pemerintah, gedung, kau bayar saja. Jadi kalau mau membangun jalan, jangan jalan negara tetapi jalan milik masyarakat. Pemerintah mengawasi saja, bagaimana mekanisme kerjanya serahkan pada masyarakat, mereka akan jaga, intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat setempat menjadi bagian dari proses pembangunan, mereka disiapkan untuk memasuki pembangunan, siap interaksi dengan pihak lain.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan selama ini tidak menempatkan OAP sebagai pemilik pembangunan. Argumentasinya, semua tanah di Papua adalah milik OAP secara komunal, sehingga apapun proyek infrastruktur Pemerintah, baik jalan, bandara, maupun pelabuhan harus menempatkan OAP seolah-olah sebagai proyeknya dan miliknya, bukan proyek negara. Kalau dikatakan, semuanya adalah proyek negara dan dilaksanakan oleh orang non-Papua, maka OAP akan menuntut pembebasan tanah sebelum pembangunan dilaksanakan. Sebaliknya, kalau dikatakan ini adalah proyek untuk masyarakat atau OAP dan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari OAP di dalamnya, maka mereka akan memberikan tanahnya secara sukarela. Inti dari sejumlah pernyataan di atas adalah Pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan di Tanah Papua harus melibatkan orang asli sebagai bagian dari proses pembangunan dan memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang asli. Bahkan kalau perlu menyiapkan mereka, termasuk melatih SDM mereka agar dapat bekerja dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Mengapa tanah tersebut nilainya sangat penting bagi OAP? Karena tanpa tanah dan sumber daya alam di dalamnya atau di atasnya, OAP tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan. Misalnya masyarakat asli di Merauke tidak semuanya dapat belajar pada transmigran untuk menanam padi, meskipun sebagian mereka dapat beradaptasi. Orang Marind terbiasa hidup dari berburu dan mengkonsumsi sagu, perlu waktu untuk penyiapan sosial yang cukup lama untuk mengubah mereka jadi petani seperti para transmigran. Demikian juga dengan proyek *Merauke Integrated Food and Estate* (MIFE), orang Marind tidak dapat dipaksa untuk bekerja di perkebunan sawit. Sebagai akibatnya, transmigrasi dan MIFE membuat orang Marind semakin terasing dari tanahnya sendiri, sebagian terpaksa menyerahkan tanah yang merupakan tempat hidup dan berburu, kemudian mereka tinggal ke tempat yang lebih jauh.

Pengambilalihan tanah dari OAP baik secara legal maupun ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit merupakan fenomena yang sekarang ini berlangsung di sejumlah tempat di Papua termasuk Merauke, Boven Digul, Nabire, dan Teluk Wondama.⁵³ Bahkan di Jayapura, pembangunan pelabuhan kargo di Depapre juga sedang bermasalah terkait dengan hak ulayat perairan yang belum diatur ketentuan perundang-undangannya. Sedangkan penguasaan tanah adat Papua oleh TNI terjadi di Biak oleh Angkatan Udara, di Manokwari oleh angkatan Darat, dan sejumlah tempat lainnya. Berbagai bentuk

⁵³ Pusaka, *Setahun Moratorium: Mendesak Negara, Memulihkan Hak Masyarakat, Laporan Pusaka 2019* (Jakarta: Yayasan Pusaka, 2019).

land grabbing, depopulasi, dan kerusuhan rasial menjadikan kerangka penentuan nasib sendiri menguat dalam konteks perjuangan untuk bertahan hidup OAP di kalangan aktivis politik Papua.

OAP yang jumlahnya semakin sedikit dan berada di pinggiran dalam perekonomian ekonomi juga mengalami marginalisasi dalam nilai adat karena lembaga adat telah dilemahkan oleh Pemerintah. Sebagai contoh Pemerintah hanya mengakui LMA dan memberikan stigma terhadap DAP yang dibentuk dari bawah. LMA dibentuk oleh Pemerintah pada masa Orde Baru, pertama kali diketuai oleh Theys H Eluay. Kemudian pada 2000, pasca Kongres II Rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua LMA menerbitkan SK Panitia KBMAP pada tahun 2001. SK ini dikeluarkan karena ada kesadaran bahwa LMA hanya menjadi bantal stempel pembangunan dan arena itu perlu dibentuk satu kelembagaan yang mendapat mandate rakyat. KBMAP I baru dilaksanakan pada 2002 setelah Theys terbunuh. Pada 2011, dilaksanakan KBMAP II di Gor Cenderawasih Jayapura, di mana Forkorus Yaboisembut, S.Pd terpilih menjadi Ketua DAP. DAP di bawah kepemimpinan Forkorus Yaboisembut cenderung menjadi salah satu faksi politik dengan mendeklarasikan diri menjadi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dimana Forkorus sebagai Presiden dan Edison Waromi menjadi Perdana Menteri. Forkorus kemudian memecat beberapa tokoh DAP yang dianggap tidak sejalan, seperti Leonard Imbhiri, Fadhal Al-Hamid, dan Jakob Kasimat. Mereka yang dipecat berpandangan bahwa DAP bukan sebuah gerakan politik seperti Presidium Dewan Papua (Papua) tetapi harus fokus pada perjuangan hak-hak dasar OAP terutama hak atas SDA dan kebudayaan. Selanjutnya pada 2015, dilakukan KBMAP III di Biak dan memilih Mananwir (ketua suku) Yan Pieter Yarangga sebagai ketua DAP dan Leonard Imbhiri sebagai Sekretaris Umum DAP. Persoalan yang muncul adalah sebagian pendukung Forkorus terutama dari DAP La Pago tidak mengakui kepemimpinan Yarangga dan mendeklarasikan diri sebagai DAP di bawah Dominikus Surabut. Kelompok ini juga menyatakan sebagai DAP La Pago. Perpecahan internal dan kurangnya rekognisi terhadap DAP menjadikan upaya pelestarian dan perlindungan nilai adat menjadi kurang efektif, sehingga tidak ada upaya sistematis untuk melakukan revitalisasi nilai adat OAP. Bahkan, nilai tersebut sengaja dilemahkan karena dianggap sebagai penghambat pembangunan.⁵⁴

Namun demikian, tidak semua lembaga pemerintah bersikap antipati terhadap DAP yang merupakan representasi gerakan kebudayaan OAP. Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada masa Yohanna Yembise, meminta masukan DAP untuk memberdayakan perempuan asli Papua. Kemudian, DAP membentuk Kelompok Kerja Perempuan Adat dan membantu program kementerian ini di tujuh wilayah adat seperti: Jayapura, Manokwari, Wamena, Biak, Kaimana, Dogiyai, dan Merauke. Pokja Perempuan membantu program ini dengan dialog dengan mama-mama asli Papua yang bekerja di pasar, program apa yang mereka inginkan dari Pemerintah. Kemudian hasil dialog tersebut direkomendasikan pada Kementerian dan ditindaklanjuti seperti penanganan pasar mama-mama, dukungan bagi kerajinan noken, dan pembuatan kelompok kerja perempuan adat.

Identitas kesukuan di Papua masih cukup kuat dimana setiap suku memiliki sistem pemerintahan adat, bahasa, dan wilayah serta tradisi kebudayaannya. Hak kepemilikan sumber daya di wilayahnya ada pada setiap suku. Program-program pembangunan Pemerintah seharusnya dibicarakan oleh Pemerintah dengan setiap suku yang menjadi lokasi program tersebut. Putusan MK No 35/2018 mengatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Oleh karena itu, prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) harus dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kepala suku dan komunitasnya harus diinformasikan dan dimintai izin atau persetujuan dan diberikan hak-haknya. Menurut FA, seorang tokoh DAP, Pemerintah dan/ pihak swasta harus berbicara dengan para pihak atau tokoh yang representatif dari suku tersebut sebelum pembangunan dimulai. Kemudian sebelum

⁵⁴ Bahkan, selain lembaga adat, pengaruh gereja juga dilemahkan sehingga masyarakat tidak memiliki panduan nilai kebudayaan dan agama karena beberapa pimpinan denominasi gereja telah menyatakan sikap kritis terhadap ketidakadilan di Papua terutama Gereja Kingmi, Gereja Baptis, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKIT).

projek dijalankan harus dilakukan penataan masyarakat adat terlebih dahulu, misalnya dengan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi siapa pemilik lahan dan sampai mana batasnya, serta siapa saja yang berhak menerima kompensasi. Wilayah-wilayah hak ulayat dan pemilikannya harus dipetakan jelas baru program pembangunan dilaksanakan. Namun, persoalan juga muncul dari kalangan internal masyarakat asli di Papua. Misalnya ketika tanah dalam bentuk hutan biasanya OAP tidak akan membicarakannya atau menuntut klaim, tetapi begitu ada pemukiman berkembang di suatu wilayah adat, mereka baru berebut klaim atas nilai tanah tersebut.

Menurut FA, strategi lain untuk mencegah marginalisasi dan depopulasi OAP sekaligus mendorong pembangunan berbasis masyarakat adat adalah mengkonfirmasi kebutuhan masyarakat adat.⁵⁵ Memang harus diakui masih ada beberapa praktik adat yang menghambat pembangunan tetapi secara perlahan akan dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat seperti memotong jari tangan satu ruas ketika saudaranya meninggal, atau tradisi mas kawin yang mahal, serta pengekangan terhadap perempuan. Sekarang ini banyak perempuan dari pegunungan yang menjadi anggota DPRD, DPRD, dan DPR RI. Perempuan dari pegunungan yang dulu masih sedikit menempuh pendidikan tinggi sekarang sudah banyak yang sekolah lanjut seperti halnya orang pesisir. Program-program pembangunan semua harus terkonfirmasi dengan adat istiadat. Contoh lain adalah pengalaman Steven Abraham, seorang pengusaha dari Merauke yang membangun jalan di Nduga sebelum PT Istaka Karya. Pengusaha ini telah membangun jalan di Nduga selama sepuluh tahun sejak pemekaran. Setelah memenangkan tender, dia pergi menemui ketua-ketua suku Nduga dan membuat kesepakatan bahwa tidak ada tentara yang dilibatkan dalam proyek konstruksi jalan tersebut. Kemudian, ia mengadakan upacara bakar batu sebagai tanda masuk dengan mengundang masyarakat pemilik hak ulayat di lokasi yang akan dibangun. Selama pembangunan berjalan, ia menyediakan dua dapur umum untuk melayani konsumsi karyawannya dan juga masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun.

Makna Pembangunan, Marginalisasi dan Depopulasi OAP

Marginalisasi dan depopulasi beserta dampaknya merupakan persoalan besar yang dialami oleh OAP pada masa kini selain kekerasan politik. Keduanya bersumber dari konsep pembangunan yang tidak mengangkat harkat dan martabat manusia Papua dan tidak memberikan tempat pada kebudayaan OAP. Pater Neles Tebay dalam ceramahnya di LIPI pada 2014 menjelaskan relasi antara praktik pembangunan dan kebudayaan sebagai berikut. *Pertama*, OAP dipandang sebagai makhluk primitif, belum maju, masih berada pada taraf awal perkembangan manusia. Semua kehidupan berlangsung menurut hukum adat. Segala permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan diselesaikan menurut praktek dan tradisi kebudayaan. Pandangan ini diperkuat dengan minimnya pendidikan formal di tengah OAP. OAP masih terbelakang karena tidak memiliki pengetahuan modern. Pandangan di atas terungkap jelas ketika orang non-Papua melihat OAP yang menggunakan koteka. Koteka dipandang sebagai simbol keterbelakangan dan keprimitifan yang memalukan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah mengira bahwa orang masih mengenakan koteka karena tidak mempunyai pakaian, maka diluncurkan operasi koteka dimana pakaian dibagikan secara gratis agar dipakai. Jadi koteka tidak dipandang sebagai hasil dari *local genius* tetapi simbol keterbelakangan dan kemiskinan, OAP yang mengenakan koteka dipandang sebagai primitif, terbelakang, dan belum tahu banyak tentang modernitas.

Kedua, ketika semua unsur kebudayaan Papua dipandang bercorak primitif dan terus-menerus mendengarkan pernyataan tentang keprimitifan kebudayaan ini, maka salah satu akibatnya adalah OAP sendiri tidak menghargai nilai kebudayaannya sendiri. Sebagai akibatnya mereka merasa malu menggunakan bahasa daerahnya, terutama di hadapan orang dari luar sukunya karena takut dipandang

⁵⁵ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

sebagai primitif atau masih kuno. Anak-anak muda kini lebih lincah berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di rumahnya.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari pandangan, maka kebudayaan Papua dipandang sebagai penghambat pembangunan. OAP belum bisa berkembang karena hidupnya masih terikat kuat dengan tradisi kebudayaannya. Tim peneliti biasa mendengar kalimat seperti ini, “orang di sini masih terikat pada adat sehingga sulit maju.” Pandangan ini melahirkan suatu stereotip bahwa “OAP tidak mampu atau tidak bisa.” Dengan demikian tradisi kebudayaannya pun tidak diperhitungkan sama sekali dalam membuat kebijakan pembangunan di Papua. Bagi Pemerintah Indonesia, tidak ada hal menarik yang dapat dipelajari dari kebudayaan tradisional Papua. Maka bisa dimengerti apabila tidak banyak orang Indonesia yang melakukan penelitian terhadap kebudayaan Papua. Keengganan orang Indonesia mempelajari kebudayaan Papua dapat dipahami karena orang biasanya ingin mempelajari sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang primitif. Studi tentang budaya Papua tidak ada gunanya karena tidak ada yang bisa dipelajari untuk hidup dan mengembangkan diri. Kebudayaan Papua tidak diperlukan demi kemajuan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Oleh karena itu kebudayaan Papua tidak diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di Tanah Papua.

Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kebudayaan Papua, selain ukiran Asmat dan sejumlah lagu Papua, kurang dipromosikan dan karena itu pula tidak dikenal di Indonesia. Akibatnya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak mengenal karakter OAP serta nilai fundamental yang menopang hidup OAP sejak dahulu hingga kini. Ketika kebudayaan Papua dipandang primitif, maka OAP pun dilihat sebagai orang yang masih primitif. Ketika kebudayaan Papua dipahami sebagai penghambat kemajuan dan pembangunan, maka para penganut kebudayaannya masih dipandang sebagai “orang yang tidak bisa atau mampu” dan karena itu tidak dapat dilibatkan dalam pembangunan.

Pada tingkatan praktis, praktik-praktik ekonomi di Papua juga tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan OAP. Perekonomian di Papua tidak hanya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi tetapi juga mencakup rangkaian tradisi kultural seperti perkawinan, duka, pertukaran barang berharga, dan lain-lain. Sebagaimana ekonomi etnis Melanesia, OAP melihat perekonomian yang baik mencakup relasi harmoni dengan leluhur, alam, dan sesama. Misalnya usaha membuka kebun akan berjalan dengan baik jika dikaitkan dengan leluhur, alam, dan sesama manusia berlangsung dengan baik. Pandangan ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menekankan pada individualisme dan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan lain ialah ekonomi Papua lebih ditunjukkan pada kesempatan dan kemampuan untuk menghasilkan makanan seperti ubi, petatas, keladi, dan lain-lain. Hasil kebun yang melimpah akan meningkatkan kedudukan seseorang dalam komunitas kulturalnya.⁵⁶

Kita juga harus memahami bahwa nilai akhir dari ekonomi Papua bukanlah akumulasi kapital atau komoditas, akan tetapi hidup baik dengan kerabat dan leluhur, sehingga tercipta relasi harmonis dengan keluarga inti dan klan sesuai dengan norma. Misalnya hasil kebun atau hasil buruan tidak hanya dimakan oleh keluarganya sendiri tetapi dibagi pada keluarga yang lain, sehingga antar keluarga saling memberi dan menerima. Produksi, distribusi, dan konsumsi selalu bersifat komunal. Relasi kekerabatan baik di dalam klan maupun antar klan jauh lebih penting daripada menyimpan hasil kebun untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, asas resiprositas merupakan inti dari perekonomian Papua yang berciri khas komunal.⁵⁷

Selain melakukan revitalisasi kebudayaan OAP, kita harus lebih memperhatikan upaya memperbaiki sumber daya manusia OAP. Marginalisasi dan depopulasi yang terjadi dimungkinkan karena rendahnya sumber daya manusia Papua. Bagian ini akan memaparkan sedikit kondisi

⁵⁶ SKPKC, “Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama Pedagang Asli Papua untuk Mendapatkan Pasar di Tengah Kota Jayapura,” SKPKC, Seri Memoria Passionis No. 23 (2011), hlm. 71.

⁵⁷ SKPKC, “Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama,” 73.

pembangunan pendidikan di Kota Jayapura yang paling maju di Provinsi Papua. Pendidikan di Tanah Papua dapat dibedakan antara di daerah kota, pesisir, terisolasi, dan terpencil. Misalnya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan setiap hari di daerah kota dan sebagian pesisir. Contoh di daerah perkotaan, misalnya Kota Jayapura, Sentani, Kota Sorong, dan Manokwari. OAP yang tinggal di kawasan perkotaan dapat dikatakan sudah memiliki tradisi pendidikan modern. Namun, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan setiap hari di daerah terpencil. Sedangkan di daerah yang masih terisolasi yang berjalan adalah pendidikan adat yang hanya diterima oleh laki-laki. Di daerah terpencil seperti Wamena, tingkat kehadiran guru masih menjadi persoalan.⁵⁸

Hasil penelitian Afriansyah merekomendasikan perlunya pendekatan pendidikan di Tanah Papua berbasis geografis, sosial budaya, dan demografi.⁵⁹ Diharapkan sistem pendidikan yang khas Papua mampu membentuk karakter OAP yang mampu menggerakkan birokrasi ekonomi, sistem politik, dan budaya, sehingga mampu menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Selain itu, relevansi pendidikan adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang pada masa lalu menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya OAP pada masa kini sehingga tetap memiliki pegangan dalam perubahan sosial yang berjalan dengan cepat. Di daerah yang didominasi pendatang, sistem pendidikan perlu menyiapkan anak Papua untuk dapat bertahan hidup ketika mereka terhubung dengan dunia luar. Di wilayah yang didominasi OAP, pendidikan harus lebih didesain pada upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Kesimpulan

Sebagaimana telah disampaikan dalam paparan di muka, sejak delapan belas tahun implementasi Otonomi Khusus Papua, tahun 2002, pembangunan di Tanah Papua menghasilkan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang jumlah penduduknya didominasi oleh orang asli Papua. Selain itu, sentra-sentra perkembangan ekonomi lebih banyak di kota-kota yang didominasi oleh komunitas pendatang maupun daerah yang menjadi lokasi transmigrasi. Kondisi ini memperkuat hasil-hasil kajian sebelumnya yang menguraikan mengenai marginalisasi orang asli Papua dalam pembangunan Indonesia.

Marginalisasi tersebut dapat dipahami dalam dua perspektif. *Pertama*, konsep dan strategi pembangunan Indonesia yang berbasis pada pertumbuhan dan ideologi kapitalisme, tidak sesuai dengan sistem kebudayaan dan nilai-nilai tradisi orang asli Papua, sehingga wajar jika komunitas pendatang menerima manfaat pembangunan lebih banyak. Sistem kebudayaan Melanesia yang berbasis pada komunalitas, pertukaran dan keseimbangan antara alam, manusia dan kekuatan penguasa alam semesta belum dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan Indonesia. *Kedua*, orang asli Papua belum dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat terlibat dalam pembangunan atau mampu memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Sebagai akibatnya, dalam perubahan sosial yang disebabkan oleh migrasi, perkembangan teknologi, dan percepatan pembangunan, maka orang asli Papua hanya menjadi objek, bahkan korban dalam pembangunan.

Marginalisasi orang asli Papua yang berkelanjutan di atas Tanah nya sendiri secara bertahap menyebabkan pertumbuhan orang asli Papua lebih lambat dibandingkan komunitas-komunitas pendatang. Walaupun terus mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, namun pertumbuhan jumlah penduduk dari komunitas pendatang lebih besar daripada orang asli Papua. Fenomena ini menjadikan orang asli Papua dalam kurun waktu 1971-2000 relatif ter-depopulasi. Setelah reformasi 1998 yang dilanjutkan dengan dengan Otonomi Khusus Papua, marginalisasi dan depopulasi terus disampaikan secara akademik baik pada tingkat nasional maupun internasional. Namun, demikian, belum ada upaya-upaya yang serius dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Papua atau Papua Barat untuk

⁵⁸ Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.

⁵⁹ Afriansyah, et.al., *Policy Paper: Alternatif Pendidikan*, 15.

menyelesaikan kedua persoalan ini. Salah satu strategi yang tepat, penulis kira, adalah dengan melaksanakan pembangunan berbasis kebudayaan Melanesia yang tepat sesuai dengan sistem nilai dan praktik-praktik kebudayaan orang asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Anggi., Kusumaningrum, Dini D., Baskoro, Andhika A., dan Prasojo Ari, P.S. (2019). *Policy Paper Alternatif Pendidikan Bagi Orang Asli di Provinsi Papua Barat*. Jakarta: Kedepatian IPSK-LIPI.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Sensus Penduduk 2010*.
<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9100000000> dan
<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9400000000>
- Chauvel, Richard. (2004). "Constructing Papuan nationalism: History, ethnicity, and adaptation." (2004).
- Deb, D. (2009). *Beyond developmentalism: Constructing inclusive freedom and sustainability*. London & Sterling VA: Earthscan.
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua. (2018). Profil kesehatan Provinsi Papua 2017. Jayapura: Dinas kesehatan Provinsi Papua.
- Elmslie, Jim, and Camellia Webb-Gannon. "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua." *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2014).
- Elmslie, Jim. *West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "slow Motion Genocide" Or Not?*. Centre for Peace and Conflict Studies, 2010.
- Farhadian, C.E. (2005). *Christianity, Islam, and nationalism in Indonesia*. London: Routledge.
- Lagowan, Bernard. (2017, November 7). Upaya Belanda membangun kesehatan Papua. Didownload dari: <https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/>
- Li, T. M. (1999). Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia. *Cultural anthropology*, 14(3), 295-322.
- Mansoben, Johszua Robert. "Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia: studi perbandingan." PhD diss., 1994.
- McGibbon, Rodd. 2004. "Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict." Policy studies 13 di East-West Center-Washington. www.eastwest.org. Diakses 24 Oktober 2007.
- McGibbon, Rodd. 2006. "Pitfalls of Papua Understanding the Conflict and its Place in Australia-Indonesia Relations," Lowy Institute Paper 13. New South Wales: Lowy Institute for International Policy.
- Oktafiani, I., Suyadnya, I. W., & Triyono. (2019). PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA. *Masyarakat Indonesia*, 45(2), 139-157.
- LIPI & TAF. (2019). *Jalan untuk Komunitas: Membangun Infrastruktur Konektivitas Jalan untuk Penghidupan Orang Asli Papua dan lingkungan hidup*. Jakarta: LIPI & TAF.
- Pamungkas, Cahyo (2008). Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi identitas di kalangan orang Papua, Tesis pada Magister Sosiologi FISIP UI, Depok.
- Pamungkas, Cahyo. (2018). "Building Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective." *Kapata Arkeologi* 14, no. 1 (2018): 111-122.
- Pamungkas, Cahyo (2018b). Can infrastructure bring peace to West Papua, makalah dipresentasikan di International Peace Research Association Conference tanggal 14-18 November 2018 di

- Ahmedabad, Hyderabad India.
- Pusaka. (2019). *Setahun Moratorium: mendesak negara, memulihkan hak masyarakat*, Laporan Pusaka 2019. Jakarta: Yayasan Pusaka
- Rumaseb, Josep & Belau, Arnold. (2018, 12 Februari). *Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua (Bagian Pertama)*". <https://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan-uskup-muninghoff-dalam-advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/>
- Sen, A. (2000). *Development as freedom*. Oxford: Alfred A. Knopf, Inc.
- Surjadi, Harry & Manembu, Angel. (1995). *Arti Tanah bagi Orang Papua*. *Harian Kompas* 25 September 1995, dimuat kembali dalam <http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi-suku-amungme.html>
- Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKP-KC). (2011). *Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama Pedagang Asli Papua untuk Mendapatkan pasar di Tengah Kota Jayapura*. Seri Memoria Passionis No. 23. Jayapura: SKPKC-FP.
- Tanasaldy, T. (2012). *REGIME CHANGE AND ETHNIC POLITICS IN INDONESIA: Dayak politics of West Kalimantan* KITLV Press Leiden. Leiden: KITLV Press.
- Tebay, Neles. (2014). *Makna Integrasi dengan Indonesia Menurut Orang Papua: Sebuah Perspektif Antropologi Kebudayaan*. Makalah dalam Seminar Integrasi Sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik, oleh Tim Kajian Papua LIPI tanggal 14 Desember 2014.
- Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI. (2019). *Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk Orang Asli Papua di Papua Barat*. Jakarta: Kedepuitan IPSK-LIPI.
- Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura (Tim SKP Jayapura). (2008). *Sehat itu Sa Pu Hak, Pemetaan Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*. Laporan penelitian lapangan, Jayapura: SKP Jayapura.

Data Wawancara:

- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan PR, Dosen Uncend, di Jayapura, 17 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan VT, Dosen Uncend, di Jayapura, 15 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan ER, Dosen Uncend, di Jayapura, 15 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan LI, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
- Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan PK, mantan anggota DPR RO, di Jayapura, 17 Januari 2020